BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Data Dinas

1.Nama Dinas :Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi (Diskopindagtan)

2.Alamat : Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gedung C Lantai 3 Cihanjuang Kota Cimahi

3.1.1 Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811. Gubernur Jenderal Willem Deandels membuat jalan Anyer Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loji) di alun-alun Cimahi sekarang.

Bandung dipersiapkan sebagai kota militer. Sekolah Jenderal seluruh angkatan, Pusat Telekom, Pusat Pos, Pusat Kereta Api, Pusat Pekerjaan Umum dan Pusat Pendidikan Tinggi.

Bandung sesuai dengan pola kepentingan penjajah, ditata dengan membaginya menjadi dua wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dari pembagian dua pola ini masih dibagi lagi menjadi : Bandung Utara dengan pusat pemerintahan Geemente sebagai pengukuran sentral pembagian wilayah antara Protestan dan Katolik. Ditandai dengan pembagian : sebelah timur sekarang jalan Merdeka hingga Lembang bagian timur, sebagai wilayah katolik dengan Gereja Katedral di jalan Jawa dan Gereja Bala Keselamatan.

Sebelah baratnya sekarang jalan Wastukencana hingga lembang bagian baratnya Advent dan kebaratnya lagi dari Geemente hingga Cimahi sebagai wilayah Protestan. Pada tahun 1874 – 1893 dilaksanakan pembuatan jalan Kereta Api Bandung – Cianjur, sekaligus pembuatan Stasiun Kereta Api di Cimahi, Pada tahun 1886 mulai dibangun pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya di Cimahi (RS Dustira, rumah tahanan militer dll).

Keduabelahan dihubungkan dengan jalan Kereta API dari Cimahi sebagai Kota Militer. Setiap Gereja pasti dibangun dekat jalan Kereta Api dan Stasiun serta berhubungan erat dengan penjaga dan dekat dengan Kantor Pos sebagai penghubung dengan markas serdadu Belanda dalam rangka pengamanan penjara.

Konsep pembelaan antara Katolik dengan Protestan berdasarkan pengaruh kondisi di negara - negara Eropa yang dibelah menjadi One Terotorial On Fith (satu wilayah satu Agama), misalnya Kerajaan Protestan Belanda walaupun hanya seluas Propinsi Jawa Barat menjadi wilayah Protestan dan tidak mau bersatu dengan Perancis yang Katolik walaupun hanya seluas pulau Kalimantan Indonesia. Demikian itulah konsep penataan negara dan kota setelah adanya perang agama antara reformasi Protestan dengan lawan kontra reformasi Katolik sangatlah berpengaruh dengan penataan Kota Bandung dan Cimahi.

Bandung dirancang sebagai Ibu Kota Negara, dikelilingi oleh kota satelit walaupun saat itu belum dinamai kota yang berjarak 11 Km, yaitu Cimahi, Soreang, Banjaran, Majalaya, Rancaekek dan Lembang. Pada tahun 1935, berdasarkan lampiran Staatsbald Tahun 1935 No.123 Cimahi Statusnya masih menjadi Kecamatan.

Kota - kota tersebut dihubungkan dengan Kereta Api yang berkaitan dengan pertahanan daratan mempunyai fungsi sebagai Gurita dalam mempersempit ruang gerak perlawanan

rakyat yang terjajah. Oleh karena itu, kota tersebut dihubungkan dengan jalan Kereta Api kecuali Lembang.

Pada saat masuk Kota Bandung Kereta Api membelah jalan Gudang Utara dan Selatan. Disini berguna untuk mengisi perbekalan atau logistik terus menuju Cikudapateuh, berhubungan dengan Pusat Perbekalan (sekarang Pindad) untuk mengisi dan memperlengkapi perlengkapan serdadu Belanda yang berangkat dari Kota Cimahi.

1. Kependudukan Jepang

Pada tahun 1943 – 1945 semasa pendudukan Jepang tidak banyak perubahan, tetapi tidaklah berarti Cimahi tidak membuat sejarah. Dengan adanya Tentara Pembela Tanah Air (PETA) Cimahi menjadi bagian ynag menentukan upaya mempercepat proses terjadinya Proklamasi 17 Agustus 1945. Pasca Proklmasi Bandung tidak terlepas dengan Cimahi. Sebaliknya Cimahi tidak terlepas dengan Bandung yang menjadi Pusat Pendidikan Sesko Seluruh Angkatan Bersenjata.

2. Kota Administratif Cimahi

Pada tahun 1962, Cimahi dibentuk kewedanaan meliputi 5 (Lima) kecamatan yaitu : Cimahi, Padalarang, batujajar, Cipatat dan Cisarua. Selanjutnya Cimahi menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung mempunyai perkembangan yang mempunyai karakteristik

perkotaan sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor. 29 tahun 1976.

Pada saat itu Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Bitung di Sulwesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Kotif Cimahi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Utara dan Cimahi Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (Rt / Rw) Kabupaten Bandung tahun 2001 sampai tahun 2010, Kotif Cimahi antara lain ditetapkan sebagai kawasan pemukiman, kawasan militer dan zona industri.

Sejak saat berdirinya Kota Administratif Cimahi telah menunjukan perubahan cukup pesat. Hal ini terutama karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, sehingga menjadikan Cimahi sebagai penyangga berbagai kegiatan di Kota Bandung. Selain itu Cimahi menjadi pusat pendidikan militer sejak jaman pendudukan Belanda dan telah tumbuh berbagi jenis perdagangan, jasa serta sektor usha lainnya.

3. Kota Cimahi

Selama kurun waktu 24 tahun terbentuknya Kota Administratif Cimahi keberadaanya telah menunjukan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi.

Perkembangan Kota Administratif tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi msyarakat, berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 1990 tentang Pemekaran 24 Kotamadya / Kabupaten menjadi 42 Kotamadya / Kabupaten, maka pada tahun 1998 Universitas Padjadjaran mengadakan penelitian / study kelayakan dimekarkannya Kabupten – Kabupaten Padalarang. Dalam hal ini kotif Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Padalarang.

Dengan diterbitkannya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak sejarah timbulnya tuntutan, desakan dan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, antara lain : Partai Politik, Forum LSM, Paguyuban, Yayasan Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk memperjuangkan peningkatan status Kotif Cimahi menjadi daerah Otonom lainnya apalagi mengingat kotif Cimahi adalah kotif pertama dan tertua di Jawa Barat yang tertinggal dengan kotif - kotif lainnya yang sudah menjadi Kotamadya.

Sebuah Persyaratan Kelayakan suatu Kota. Masyarakat Kota Cimahi mendesak diadakan study kelayakan Kotif Cimahi menjadi Kota oleh 5 (Lima) Perguruan Tinggi yaitu ; UNPAD, ITB, UPI, STPDN dan UNJANI. Kotif Cimahi layak menjadi suatu daerah Otonom.

Berdasarkan hasil tersebut diusulkan berbagai komponen masyarakat dan hasil study kelayakan tersebut diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan DPRD Tingkat I Jawa Barat.

Dengan adanya persetujuan dri Pemerintah Propinsi Jawa Barat selanjutnya diusulkan ke Tingkat Pusat yaitu Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta DPR RI.

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, maka ditetapkanlah Undang – Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi yang disahkan dan di-Undangkan pada tanggal 21 Juni tahun 2003.

Secara formal Kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan yaitu : Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara dan 15 (lima belas) Kelurahan yaitu : Kelurahan Cibeber, Leuwigajah, Utama, Cibeureum, Melong, Baros, Karang Mekar, Padasuka, Setiamanah, Cigugur Tengah, Cimahi, Pasir Kaliki, Cibabat, Citeureup, Cipageran.

Adapun batas Wilayah Kota Cimahi adalah :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung.

2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.

3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Margaasih, Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung dan

4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung.

3.1.2 Asal Usul Terbentuknya DISKOPINDAGTAN

a. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian merupakan pelaksanaan otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian unsur Pemerintahan Daerah, dibidang Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian

b. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.

c. Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

d. Pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang

3.1.3 Visi dan misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi :

"DENGAN IMAN DAN TAQWA, OPTIMIS DAN CERDAS JADIKAN CIMAHI KOTA MAJU, AGAMIS, NYAMAN TERTIB, AMAN DAN PRODUKTIF"

Misi Kota Cimahi :

a. Meningkatkan sarana Perekonomian dan Lapangan Kerja
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
c. Meningkatkan penataan dan penegakan hokum
d. Meningkatkan infrastruktur
e. Mengendalikan pengembangan agar berwawasan lingkungan
f. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha.

Visi dan misi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi

Visi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi :

"Terwujudnya penduduk yang teridentitas, masyarakat yang sejahtera dan tenaga kerja produktif dan berdaya saing"

Misi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi :

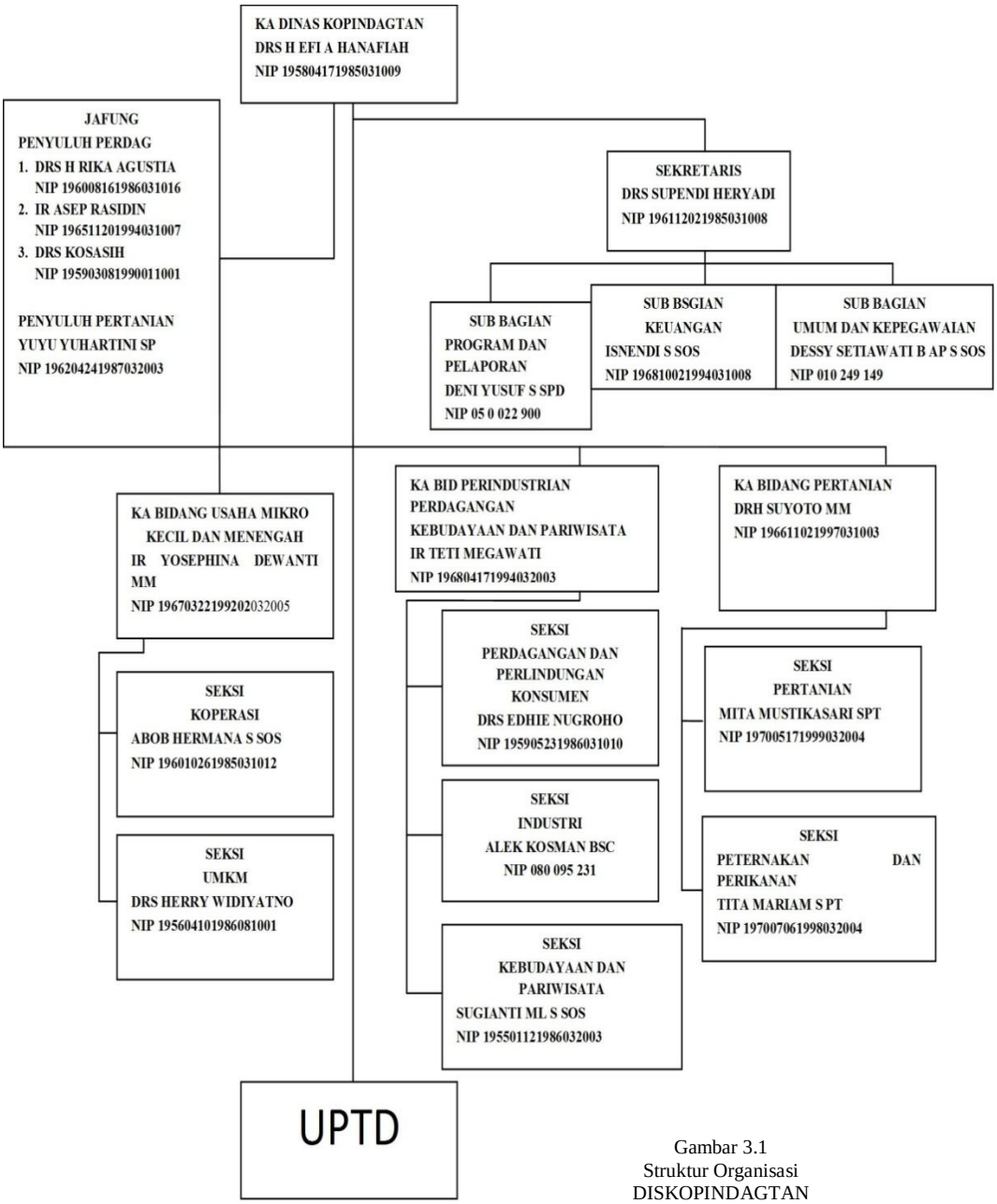
a. Meningkatkan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Meningkatkan pelayanan di bidang sosial
c. Meningkatkan pelayanan di bidang penempatan, pelatihan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi
d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

e. Meningkatkan kualitas Saranana dan Prasarana.

3.2 Struktur Organisasi DISKOPINDAGTAN

BADAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI KUKM PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERTANIAN



Gambar 3.1
Struktur Organisasi
DISKOPINDAGTAN

3.3 Deskripsi Kerja

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (DISKOPINDAGTAN) Pemkot cimahi tentu saja bergerak di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan pertanian.

Diskopindagtan di bagi menjadi 4 divisi atau bagian, yaitu :

a. Dinas Koperasi

   Dinas Koperasi ini bergerak di bidang Perkoperasian yang ada di seluruh bagian Kota Cimahi. Semua koperasi yang terdapat di kota cimahi wajib memberikan data nya pada dinas koperasi pusat yang ada di pemkot cimahi, agar mengenai perkembangan dan masalah dapat teranalisis oleh dinas perkoperasian.

b. Dinas Perindustrian

   Dinas Perindustrian bergerak dalam pengumpulan dan pengolahan data segala jenis tempat usaha yang berupa industri yang ada di cimahi, tujuannya tidak lain untuk dapat memudahkan mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia industri yang terdapat di kota cimahi. Ataupun masalah yang terdapat pada perindustian dapat diketahui dan dapat segera di tangguangi agar kerugian materil dan moril akibat PHK oleh suatu perusahaan industri karena mengalami masalah produksi bisa di tekan atau di cegah.

c. Dinas Perdagangan

Dinas perdagangan di pemkot cimahi merupakan dinas yang mengurus tentang data – data yang berhubungan dengan perdagangan yang ada di koa cimahi, biasanya pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke pasar – pasar atau toko – toko yang mempengaruhi transaksi bisnis yang terjadi di kota cimahi. Peningkatan jumlah produksi dan konsumsi setiap tahunnya dapat dilihat dan di analisis.

d. Dinas Pertanian

Dinas pertanian pemkt cimahi bertugas untuk memantau, melihat perkembangan pertanian di kota cimahi, serta mencatat jumlah sawah atau perkebunan yang terdapat di kota cimahi, agar kelakdata yang diperoleh setiap tahunnya dapat diketahui jumlah produksi beras yang dihasilkan oleh para petani di cimahi. Bila jumlah produksi beras kurang dari target untuk dipasarkan di lingkungan masyarakat di cimahi, maka pemerintah cimahi mencari jalan lain untuk memenuhinya. Ataupun bagaimana cara mensejahterakan petani yang ada di kota cimahi.